

Analisis Kualitatif Belanja Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani dan Ekonomi Inklusif Deli Serdang

Agus Edy Rangkuti¹, Tavi Supriana², Lindawati³, Sri Fajar Ayu⁴

¹Politeknik Negeri Medan, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: agusrangkuti@polmed.ac.id¹, tavi@usu.ac.id², lindabahar84@gmail.com³,
srifajar.ayu@gmail.com⁴

Article History:

Received: 27 Februari 2026

Revised: 06 Maret 2026

Accepted: 12 Maret 2026

Keywords: *Agricultural spending, farmers' welfare, inclusive growth, qualitative analysis, Deli Serdang.*

Abstract: *This study examines the impact of government agricultural expenditure on farmers' welfare and inclusive economic growth in Deli Serdang Regency, North Sumatra, using a qualitative approach. The research aims to understand farmers' perceptions of government programs, analyze how implementation mechanisms influence social and economic dynamics, and evaluate their contribution to inclusive growth. Data were collected through in-depth semi-structured interviews with 12 informants, field observations, and document analysis, using thematic analysis for data interpretation. While previous quantitative studies have shown a positive correlation between government support and farmers' welfare, this research reveals a significant gap between policy intentions and on-the-ground reality. Findings indicate that while subsidies provide direct benefits in reducing production costs, aid distribution is often inefficient and poorly targeted due to the role of informal "gatekeepers" within farmer groups. This creates social friction and fosters a cycle of dependency, where planting schedules are dictated by aid disbursement rather than optimal seasonal cycles. The study concludes that the effectiveness of government spending is not determined by the amount allocated but by the fairness, transparency, and quality of its implementation. Achieving truly inclusive growth requires a shift from charity-based assistance to capacity-building empowerment and differentiated programs based on specific agro-ecological zones.*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia, berperan krusial dalam menjamin ketersediaan pangan nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar populasi. Berbagai studi telah menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Misalnya, Breemer et al. (2024) menegaskan bahwa sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan memiliki peran signifikan dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun memiliki peran strategis, sektor pertanian sering dihadapkan pada tantangan struktural, termasuk rendahnya produktivitas dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Kondisi ini membuat rumah tangga petani rentan terhadap guncangan ekonomi, yang pada akhirnya dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan (Hapsari et al., 2021). Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan dan alokasi dana menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menginvestasikan sejumlah besar dana di sektor pertanian. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta pelatihan. Harapannya, dukungan finansial ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Penelitian oleh Prasada et al. (2024) menguatkan pandangan ini dengan menemukan bahwa infrastruktur pertanian dan dukungan pemerintah memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Namun, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi di lapangan.

Pertanyaan mendasar yang seringkali terabaikan dalam studi kuantitatif adalah bagaimana "jejak uang negara" ini benar-benar memengaruhi kehidupan petani secara kualitatif. Meskipun data makro dapat menunjukkan korelasi antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan, data tersebut sering gagal menangkap nuansa, tantangan, dan persepsi petani itu sendiri. Penelitian oleh Antara dan Effendy (2018), meskipun berfokus pada optimasi sumber daya, secara implisit menunjukkan bahwa alokasi sumber daya yang optimal—yang seringkali didorong oleh kebijakan pemerintah—sangat penting untuk mencapai pendapatan maksimum bagi petani. Namun, apakah alokasi ini benar-benar optimal dari sudut pandang petani? Pendekatan kualitatif menjadi krusial untuk menjawab pertanyaan ini.

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, menyajikan konteks studi yang sangat menarik. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Medan, Deli Serdang memiliki potensi pertanian yang besar, namun juga menghadapi tekanan dari urbanisasi dan industrialisasi. Dinamika ini membuat studi kasus di Deli Serdang relevan untuk menguji bagaimana intervensi pemerintah di sektor pertanian berinteraksi dengan realitas sosial-ekonomi yang kompleks. Studi tentang pengembangan potensi, seperti yang dilakukan oleh Pujiasmanto et al. (2019) terhadap beras organik, menunjukkan bahwa ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan. Di Deli Serdang, pertanyaannya adalah apakah program pemerintah telah berhasil mengidentifikasi dan mendukung potensi serupa.

Tabel 1. Implikasi Pemilihan Kabupaten Deli Serdang

Aspek	Deskripsi	Implikasi
Lokasi dan Peran Strategis	Kabupaten Deli Serdang, daerah penyangga Ibu Kota Medan.	Lokasi strategis, terpengaruh arus urbanisasi dan industrialisasi.
Potensi Pertanian	Memiliki sumber daya alam dan lahan yang mendukung berbagai komoditas pertanian, termasuk beras.	Potensi besar untuk pengembangan komoditas unggulan, misalnya beras organik.
Tantangan Utama	Tekanan dari urbanisasi, industrialisasi, dan konversi lahan pertanian.	Risiko penurunan produksi dan kesejahteraan petani jika tidak dikelola dengan baik.

Peluang	Studi Pujiasmanto et al. (2019) menunjukkan keberhasilan pengembangan beras organik di daerah lain.	Potensi replikasi model serupa di Deli Serdang untuk mendorong ekonomi pedesaan.
---------	---	--

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang (2025) dan Pujiamanto et al (2019)

Lebih dari sekadar meningkatkan kesejahteraan petani, penelitian ini juga akan menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan konsep pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan peluang bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan (Purwanegara et al., 2018). Dalam konteks pedesaan, inklusivitas sangat berkaitan dengan pemberdayaan petani agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan tidak terpinggirkan. Penelitian Badrudin et al. (2021) tentang Dana Desa menunjukkan bahwa alokasi dana pemerintah dapat berkontribusi pada pembangunan desa yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis apakah pengeluaran pemerintah di sektor pertanian Deli Serdang juga berhasil menciptakan dampak serupa, atau justru memperlebar kesenjangan.

Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen akan memungkinkan peneliti untuk menangkap cerita dan perspektif yang mendalam dari para petani. Ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan di tingkat akar rumput. Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada data makro, studi ini akan menelusuri bagaimana implementasi program mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan bahkan politik di tingkat komunitas petani, sejalan dengan pendekatan yang digunakan oleh Pagliacci dan Zavalloni (2024) yang menganalisis determinan ekonomi-politik dari dana agri-lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut: Penelitian ini berupaya memahami secara mendalam persepsi dan pengalaman petani di Kabupaten Deli Serdang terhadap berbagai program pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, dengan menelaah bagaimana mekanisme penyaluran dan implementasi program-program tersebut memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di tingkat petani, sejauh mana menurut pandangan mereka pengeluaran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, serta bagaimana secara kualitatif dampaknya tercermin pada indikator pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah tersebut

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dampak pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Deli Serdang melalui pendekatan kualitatif. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada deskripsi dan analisis persepsi serta pengalaman petani terhadap program-program pemerintah di sektor pertanian dengan merujuk pada temuan Prasada et al. (2024) dan Breemer et al. (2024), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi program tersebut dari sudut pandang petani sebagaimana dibahas dalam konteks alokasi sumber daya oleh Antara dan Effendy (2018), menganalisis dampak kualitatif pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan kualitas hidup petani sejalan dengan studi Hapsari et al. (2021), serta menyajikan temuan yang dapat menjelaskan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah studi sebagaimana relevan dengan konteks Badrudin et al. (2021) dan Purwanegara et al. (2018).

LANDASAN TEORI

Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) di sektor pertanian merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi. Menurut Keynes (1936) dalam teori makroekonominya, pengeluaran pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi secara lebih luas, termasuk di sektor pertanian yang padat karya. Teori ini menjadi fondasi utama dalam berbagai kebijakan intervensi negara di sektor produktif.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa alokasi anggaran publik untuk pertanian di negara-negara berkembang merupakan prasyarat penting bagi transformasi struktural ekonomi. Investasi publik di sektor ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga menciptakan keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward and forward linkages) yang mempercepat pertumbuhan sektor-sektor lain. Pandangan serupa dikemukakan oleh Fan et al. (2000) yang menemukan bahwa setiap rupiah investasi pemerintah dalam penelitian pertanian, infrastruktur pedesaan, dan pendidikan menghasilkan dampak pengurangan kemiskinan yang signifikan di negara-negara berkembang Asia.

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah di sektor pertanian secara umum mencakup beberapa komponen utama, yaitu: subsidi input produksi (pupuk, benih, pestisida), pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, jalan pertanian), program penyuluhan dan pelatihan, serta bantuan modal usaha dan kredit pertanian. Prasada et al. (2024) secara empiris membuktikan bahwa infrastruktur pertanian dan dukungan pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Penelitian tersebut memperkuat urgensi alokasi anggaran publik yang tepat sasaran sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Breemer et al. (2024) dalam penelitiannya mengenai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, membuktikan bahwa sektor-sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kesejahteraan masyarakat secara agregat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya komitmen pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian, khususnya di daerah-daerah yang masih bergantung secara ekonomi pada aktivitas agraria seperti Kabupaten Deli Serdang.

Namun demikian, besarnya alokasi anggaran belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas pembangunan pertanian. World Bank (2008) dalam laporan World Development Report-nya menekankan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah di sektor pertanian sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, mekanisme distribusi yang transparan, dan keterlibatan aktif petani dalam perencanaan program. Antara dan Effendy (2018) secara lebih spesifik menunjukkan bahwa optimasi alokasi sumber daya di tingkat petani adalah kunci untuk memaksimalkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, yang implikasinya menuntut kebijakan pemerintah yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Kesejahteraan Petani

Konsep kesejahteraan petani merupakan konstruk multidimensi yang melampaui sekadar ukuran pendapatan. Sen (1999) melalui pendekatan capability approach-nya menegaskan bahwa kesejahteraan sejati ditentukan oleh kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai, yang mencakup akses terhadap sumber daya, kebebasan memilih, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pertanian, pendekatan ini berarti bahwa kesejahteraan petani tidak cukup diukur hanya dari besar kecilnya pendapatan, tetapi

juga dari kemampuan mereka mengakses lahan, teknologi, pasar, dan layanan sosial.

BPS Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih operasional dengan mengukur kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP), yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dari hasil produksinya dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk kebutuhan hidupnya. Nilai NTP di atas 100 mengindikasikan petani berada dalam kondisi surplus, sedangkan di bawah 100 menunjukkan kondisi defisit. Meskipun demikian, indikator tunggal ini sering dianggap tidak cukup komprehensif untuk menggambarkan kompleksitas kesejahteraan rumah tangga petani.

Hapsari et al. (2021) dalam penelitiannya terhadap petani hortikultura di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa kesejahteraan keluarga petani bervariasi secara signifikan dan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari luas lahan yang dikuasai, akses terhadap teknologi dan pasar, hingga modal sosial yang dimiliki. Penelitian tersebut menjadi landasan penting untuk memahami bahwa intervensi kebijakan yang seragam (*one-size-fits-all*) sering kali tidak mampu mengakomodasi heterogenitas kondisi petani, sehingga menghasilkan dampak yang tidak merata.

Literatur ekonomi pertanian mengidentifikasi sejumlah faktor determinan kesejahteraan petani. Pertama, akses terhadap faktor produksi, terutama lahan dan modal. Ellis (2000) dalam kerangka *sustainable rural livelihoods*-nya menekankan bahwa diversifikasi aset (fisik, manusia, sosial, alam, dan finansial) merupakan strategi utama bagi rumah tangga pedesaan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan mereka.

Kedua, aksesibilitas terhadap infrastruktur pertanian. Berbagai studi menunjukkan bahwa infrastruktur fisik seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan berkorelasi positif dengan produktivitas dan pendapatan petani. Prasada et al. (2024) membuktikan secara statistik bahwa investasi infrastruktur pertanian oleh pemerintah berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia, dengan efek yang lebih besar terasa di wilayah-wilayah yang sebelumnya kekurangan infrastruktur.

Ketiga, kelembagaan dan modal sosial. Petani yang tergabung dalam kelompok tani yang aktif dan memiliki akses terhadap koperasi atau lembaga keuangan pedesaan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Namun demikian, Pagliacci dan Zavalloni (2024) mengingatkan bahwa determinan non-ekonomi, termasuk faktor politik dan kelembagaan, turut berperan besar dalam proses distribusi dana dan manfaat program, yang tidak jarang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan yang lain.

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi inklusif (*inclusive economic growth*) adalah sebuah paradigma pembangunan yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terjadi secara luas, merata, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati hasilnya. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kritik bahwa pertumbuhan ekonomi konvensional seringkali berjalan beriringan dengan meningkatnya ketimpangan.

Ranieri dan Ramos (2013) mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang (1) menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan (2) memastikan akses yang sama terhadap peluang-peluang tersebut bagi seluruh anggota masyarakat. Definisi ini menegaskan dua dimensi kunci inklusivitas: dimensi pertumbuhan itu sendiri dan dimensi distribusi manfaat. Dalam konteks pedesaan dan pertanian, kedua dimensi ini sangat relevan karena pertanian adalah sektor yang menghidupi sebagian besar penduduk miskin di negara-negara berkembang.

Purwanegara et al. (2018) memberikan konteks yang lebih spesifik dalam ranah agribisnis

Indonesia, dengan menekankan pentingnya inklusivitas kolaboratif (*collaborative inclusiveness*) yang memungkinkan petani kecil di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dalam rantai nilai pertanian melalui platform digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa inklusivitas bukan hanya tentang redistribusi, tetapi juga tentang penciptaan ekosistem yang memungkinkan seluruh pelaku, termasuk petani kecil, untuk berinovasi dan bersaing.

Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan inklusif di sektor pertanian mencakup beberapa fungsi kunci: regulasi pasar input dan output, investasi dalam barang publik (infrastruktur, riset), perlindungan sosial, dan pemberdayaan kelompok yang rentan. World Bank (2012) dalam strategi *Inclusive Green Growth*-nya menegaskan bahwa investasi publik yang cerdas di sektor pertanian adalah salah satu jalur paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Badrudin et al. (2021) secara empiris mendemonstrasikan bagaimana Dana Desa di Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif bagi pembangunan desa yang inklusif. Penelitian tersebut menemukan bahwa alokasi Dana Desa yang tepat sasaran untuk infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berkontribusi pada peningkatan indikator pembangunan di tingkat desa. Temuan ini memberikan landasan empiris bahwa instrumen fiskal pemerintah, jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, mampu menjadi katalisator pertumbuhan inklusif di pedesaan.

Namun demikian, terdapat risiko serius bahwa pengeluaran pemerintah justru dapat memperburuk ketimpangan jika mekanisme distribusinya tidak dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Stiglitz (2012) memperingatkan bahwa kebijakan publik yang tidak memperhatikan dimensi distribusi dapat memperkuat keuntungan bagi kelompok yang sudah sejahtera, sementara meninggalkan mereka yang paling membutuhkan tanpa manfaat yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *single case study* (studi kasus tunggal) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat diukur secara numerik, yaitu persepsi, pengalaman, dan pemaknaan petani terhadap program pengeluaran pemerintah di sektor pertanian (Creswell, 2014). Metode studi kasus dipilih mengikuti rekomendasi Yin (2014) karena pertanyaan penelitian berfokus pada "*bagaimana*" dan "*mengapa*" suatu kebijakan berdampak pada kehidupan petani dalam konteks nyata di lapangan, bukan sekadar mengukur korelasi statistik.

Berbeda dengan penelitian kuantitatif terdahulu seperti Prasada et al. (2024) dan Hapsari et al. (2021) yang memetakan pola umum melalui data numerik, penelitian ini berupaya menggali kedalaman makna di balik angka-angka tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa, kontradiksi, dan kompleksitas implementasi program yang hanya dapat diungkap melalui narasi langsung dari pelaku utamanya, yakni para petani dan aparat lapangan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dipilih secara purposif untuk mewakili tiga karakteristik agroekologis yang berbeda. Pemilihan lokasi ini penting agar temuan dapat mencerminkan heterogenitas kondisi pertanian di Deli Serdang secara menyeluruh, bukan hanya satu zona ekologis.

Tabel 2. Lokasi Penelitian dan Karakteristik Agroekologis

Kecamatan	Karakteristik Wilayah	Komoditas Utama	Alasan Pemilihan
Beringin	Dataran rendah aluvial, irigasi teknis dari Sungai Ular, ketinggian ± 25 mdpl	Padi sawah	Sentra padi, infrastruktur lengkap
Lubuk Pakam	Peri-urban, ibu kota kabupaten, tekanan konversi lahan tinggi	Sayuran, palawija	Mewakili zona urban-pertanian
Galang	Dataran bergelombang, curah hujan ± 2.100 mm/tahun, berbatasan dengan Karo	Padi, hortikultura, potensi organik	Potensi organik dan diversifikasi

Sumber: BPS Deli Serdang (2024) dan observasi lapangan penelitian

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama tiga bulan, yakni dari Februari hingga April 2025. Peneliti melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk wawancara, observasi, dan verifikasi data dokumen. Penetapan durasi ini didasarkan pada estimasi kebutuhan waktu untuk mencapai saturasi data, yaitu kondisi di mana wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema atau informasi baru (Patton, 2002).

Subjek Penelitian dan Teknik Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, bukan secara acak. Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif tidak mengejar representasi statistik, melainkan kedalaman informasi dari subjek yang paling relevan dan berpengalaman (Miles et al., 2014). Tiga kelompok narasumber dilibatkan untuk memastikan triangulasi sumber data:

Tabel 3. Kriteria dan Jumlah Narasumber Penelitian

Kelompok Narasumber	Kriteria Pemilihan	Jumlah	Kecamatan
Petani aktif	Telah menerima atau merasakan dampak minimal satu program pemerintah dalam 3 tahun terakhir; masih aktif berproduksi	8 orang	Ketiganya
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)	Bertugas aktif di kecamatan lokasi penelitian; memiliki pengalaman minimal 5 tahun mendampingi program	2 orang	Beringin & Galang
Kepala desa / tokoh masyarakat	Memahami kondisi sosial-ekonomi petani di wilayahnya; terlibat dalam koordinasi program desa	2 orang	Galang & Lubuk Pakam
Total		12 orang	

Sumber: Rancangan penelitian (2025)

Saturasi data dicapai pada wawancara ke-10. Dua wawancara terakhir dilakukan semata untuk konfirmasi konsistensi tema yang telah muncul. Dengan demikian, jumlah 12 narasumber dinilai memadai untuk menghasilkan pemahaman yang jenuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang saling melengkapi, sebagaimana direkomendasikan oleh Denzin (1978) untuk keperluan triangulasi:

Pertama, *wawancara mendalam semi-terstruktur (in-depth semi-structured interview)*. Panduan wawancara disusun berdasarkan tema-tema kunci yang diturunkan dari pertanyaan penelitian, namun peneliti diberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu yang muncul secara spontan selama wawancara berlangsung. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 60 hingga 90

menit dan direkam dengan persetujuan narasumber. Rekaman kemudian ditranskripsikan secara verbatim sebagai dasar analisis.

Kedua, *observasi lapangan*. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke lahan pertanian, kantor kelompok tani, dan kantor desa untuk mengamati aktivitas sehari-hari petani, proses distribusi bantuan, serta kondisi infrastruktur pertanian. Observasi dilakukan secara non-partisipatif dengan mencatat temuan dalam catatan lapangan (*field notes*) yang terstruktur.

Ketiga, *studi dokumen*. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, meliputi: (a) Laporan APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 untuk alokasi belanja pertanian, (b) data statistik BPS tentang kemiskinan, produktivitas pertanian, dan Indeks Gini tingkat kabupaten, (c) dokumen perencanaan Dinas Pertanian Deli Serdang, serta (d) laporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat iteratif menggunakan model analisis tematik yang dikembangkan oleh Miles et al. (2014), yang terdiri dari tiga tahap yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan:

Tahap pertama adalah *kondensasi data (data condensation)*. Seluruh transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan. Peneliti melakukan pengkodean terbuka (*open coding*) untuk mengidentifikasi satuan makna, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori dan tema yang lebih abstrak melalui pengkodean aksial (*axial coding*).

Tahap kedua adalah *penyajian data (data display)*. Tema-tema yang telah teridentifikasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks perbandingan, dan bagan untuk mempermudah interpretasi dan penarikan makna. Penyajian ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi pola, kontradiksi, dan hubungan antartema.

Tahap ketiga adalah *penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification)*. Kesimpulan awal yang bersifat tentatif terus diverifikasi dengan cara merujuk kembali ke data asli dan membandingkan dengan temuan dari narasumber yang berbeda. Kesimpulan dinyatakan final apabila sudah konsisten dengan seluruh bukti yang tersedia.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dijamin melalui empat kriteria yang dirumuskan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Kredibilitas (*credibility*) dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari tiga kelompok narasumber (petani, PPL, dan kepala desa/tokoh masyarakat). Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengkonfirmasi konsistensi temuan. Selain itu, peneliti melakukan *member checking*, yakni mengonfirmasi ulang interpretasi kepada narasumber kunci untuk memastikan akurasi pemaknaan.

Transferabilitas (*transferability*) dijaga melalui penyajian deskripsi yang kaya dan tebal (*thick description*) tentang konteks penelitian, sehingga pembaca dapat menilai sendiri relevansi temuan dengan konteks lain yang mereka hadapi.

Dependabilitas dan konfirmabilitas dijaga melalui penyimpanan seluruh jejak audit (*audit trail*) penelitian, meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan catatan analitis, yang dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh pihak ketiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Karakteristik Narasumber

Penelitian ini melibatkan 12 narasumber yang dipilih secara purposive dari tiga kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, dan Kecamatan Galang. Ketiga kecamatan ini dipilih karena mewakili tiga karakteristik agroekologis yang berbeda: wilayah peri-urban (Lubuk Pakam), dataran rendah persawahan (Beringin), dan wilayah transisi perkebunan-pangan (Galang). Narasumber terdiri atas tiga kelompok utama: petani aktif penerima program (8 orang), petugas lapangan Dinas Pertanian (2 orang), dan kepala desa atau tokoh masyarakat (2 orang). Saturasi data dicapai pada wawancara ke-10, dan dua wawancara terakhir dilakukan untuk konfirmasi.

Tabel 4. Profil Narasumber Penelitian

No	Kode	Peran	Kecamatan	Lama Bertani / Bertugas	Program yang Diikuti
1	N-01	Petani padi	Beringin	22 tahun	Subsidi pupuk, benih
2	N-02	Petani sayur	Lubuk Pakam	14 tahun	Subsidi pupuk
3	N-03	Petani padi	Galang	30 tahun	Subsidi pupuk, alat tani
4	N-04	Petani campuran	Beringin	18 tahun	Benih, pelatihan
5	N-05	Petani sayur	Lubuk Pakam	9 tahun	Tidak menerima
6	N-06	Petani padi	Galang	25 tahun	Subsidi pupuk, irigasi
7	N-07	Pengurus Poktan	Beringin	20 tahun	Semua program
8	N-08	Petani padi	Galang	11 tahun	Subsidi pupuk
9	N-09	PPL Dinas Pertanian	Beringin	8 tahun bertugas	–
10	N-10	PPL Dinas Pertanian	Galang	12 tahun bertugas	–
11	N-11	Kepala Desa	Galang	–	–
12	N-12	Tokoh Masyarakat	Lubuk Pakam	–	–

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Persepsi Petani terhadap Program Pemerintah

Secara umum, seluruh narasumber petani mengakui manfaat program pemerintah, namun dengan berbagai catatan kritis. Dari delapan petani yang diwawancarai, enam di antaranya menyatakan bahwa subsidi pupuk adalah program yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung. Narasumber N-01, seorang petani padi berusia 52 tahun di Kecamatan Beringin dengan lahan seluas 1,2 hektar, mengungkapkan:

"Subsidi pupuk itu betul-betul membantu. Tanpa itu, biaya produksi kami bisa dua kali lipat. Tapi masalahnya, jatah yang kami dapat sering tidak cukup untuk satu musim tanam penuh, padahal lahan kami tidak besar."

Pandangan serupa disampaikan oleh N-03, petani padi di Kecamatan Galang dengan pengalaman bertani 30 tahun. Narasumber ini menyoroti bahwa program bantuan alat pertanian yang diterima kelompok taninya cukup membantu, tetapi tidak selalu tepat guna:

"Alatnya ada, traktor kecil itu. Tapi kami harus bergantian pakainya, dan kadang rusak sebelum semua bagian pakai. Perbaikannya juga tidak ada tanggung jawab yang jelas dari siapa."

Kontras dengan persepsi positif di atas, dua narasumber yang tidak terdaftar dalam kelompok tani aktif (N-02 dan N-05, keduanya petani sayur di Lubuk Pakam) menyatakan tidak pernah menerima manfaat program secara langsung. N-05 mengungkapkan rasa frustrasinya:

"Saya sudah lama tanam sayur di sini, tapi belum pernah dapat bantuan apa pun. Yang dapat itu ya yang sudah masuk kelompok dan dekat dengan pengurusnya. Kami yang kecil ini tidak kelihatan."

Dari sisi kelembagaan, petugas penyuluh lapangan (PPL) N-09 dan N-10 memberikan perspektif yang lebih struktural. Menurut N-09, tantangan terbesar bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada keterbatasan SDM penyuluh dan cakupan wilayah yang terlalu luas per petugas. N-09 menyatakan:

"Satu PPL itu bisa membawahi lima sampai tujuh desa. Mana mungkin kami bisa pantau semua dengan optimal? Petani yang aktif dan mudah dijangkau yang lebih sering terfasilitasi."

Dinamika Sosial akibat Mekanisme Distribusi

Wawancara mendalam mengungkap bahwa mekanisme distribusi bantuan melalui kelompok tani menimbulkan dinamika sosial yang tidak selalu kondusif. Kepala Desa Galang (N-11) menceritakan bahwa dalam dua tahun terakhir terjadi gesekan antarwarga yang bersumber dari ketidakmerataan distribusi bantuan benih:

"Ada yang merasa tidak adil. Kelompok A dapat banyak, kelompok B dapat sedikit, padahal lahannya tidak jauh beda. Ini yang bikin suasana di desa jadi kurang harmonis."

Narasumber N-07, pengurus kelompok tani di Kecamatan Beringin, menjelaskan sisi lain dari dinamika ini. Menurutnya, tekanan administrasi yang tinggi untuk pelaporan bantuan seringkali membebani pengurus kelompok yang rata-rata hanya berpendidikan SLTA:

"Kami harus isi laporan banyak macam. Kadang kami sendiri bingung mana format yang benar. Kalau salah isi, bantuan bisa terlambat. Kami bukan pegawai, tapi tugasnya hampir seperti pegawai."

Fenomena ketergantungan juga teridentifikasi secara konsisten dalam wawancara. N-03, N-06, dan N-08 secara terpisah mengungkapkan pola yang sama: jadwal tanam mereka cenderung mengikuti jadwal pencairan bantuan, bukan semata-mata mengikuti kalender musim tanam yang optimal. Tokoh masyarakat N-12 dari Lubuk Pakam mengamati:

"Kalau bantuan belum cair, banyak petani yang menunggu dulu. Padahal waktunya sudah tepat untuk mulai tanam. Ini yang bikin produksi sering tidak maksimal dari sisi waktu."

Diskrepansi Kebijakan-Implementasi dalam Perspektif Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus memperhalus narasi yang telah dibangun oleh penelitian-penelitian kuantitatif terdahulu. Prasada et al. (2024) membuktikan secara statistik adanya korelasi positif antara dukungan pemerintah dan kesejahteraan petani di Indonesia. Namun, data kualitatif dari Deli Serdang memperlihatkan bahwa korelasi positif tersebut tidak terdistribusi secara merata: korelasi itu nyata bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani aktif, memiliki lahan yang cukup, dan berlokasi di wilayah dengan infrastruktur memadai, tetapi hampir tidak terasa bagi petani marjinal yang tidak masuk dalam jaringan kelembagaan tersebut.

Kesenjangan implementasi yang ditemukan ini selaras dengan kerangka analisis Pagliacci dan Zavalloni (2024) yang menegaskan bahwa alokasi dana agri-lingkungan di negara manapun tidak pernah sepenuhnya netral secara politik. Di Deli Serdang, peran pengurus kelompok tani sebagai *gatekeeper* distribusi bantuan menciptakan hierarki informal yang menentukan siapa yang mendapat akses dan siapa yang tidak. Kondisi ini berimplikasi langsung pada temuan Hapsari et al. (2021) yang menemukan variasi besar dalam tingkat kesejahteraan antarpetani hortikultura di Jawa Barat; variasi serupa ditemukan dalam penelitian ini di Deli Serdang, dengan dimensi geografis yang turut mempengaruhi polarisasi tersebut.

Dari sudut pandang pertumbuhan inklusif, Badrudin et al. (2021) menunjukkan bahwa Dana Desa dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif bila dikelola dengan baik.

Penelitian ini menemukan bahwa di Kecamatan Galang, sebagian Dana Desa memang dialokasikan untuk infrastruktur pertanian mikro seperti saluran irigasi tersier dan pengerasan jalan tani. Kepala Desa N-11 mengonfirmasi bahwa sinergi antara Dana Desa dan program Dinas Pertanian, meskipun belum terkoordinasi secara sistematis, memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan program yang berdiri sendiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan Dana Desa dengan program sektoral berpotensi menjadi model yang lebih inklusif.

Siklus Ketergantungan dan Hambatan Menuju Kemandirian

Salah satu temuan paling kritis dalam penelitian ini adalah keberadaan siklus ketergantungan yang mengakar dalam pola perilaku petani. Pola di mana jadwal tanam mengikuti jadwal pencairan bantuan — bukan kalender musim — merupakan distorsi serius yang menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Antara dan Effendy (2018) menekankan bahwa optimasi alokasi sumber daya oleh petani adalah kunci pendapatan maksimum. Namun temuan ini menunjukkan bahwa desain program pemerintah yang tidak tepat justru menciptakan distorsi dalam pengambilan keputusan petani, sehingga menghalangi optimasi yang dimaksud.

Kondisi ini juga berpotensi menghambat agenda pertumbuhan inklusif yang dirumuskan oleh Purwanegara et al. (2018), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dan inovatif dari pelaku pertanian. Petani yang terjebak dalam siklus menunggu bantuan sulit untuk berinovasi dan merespons dinamika pasar secara mandiri. Di sinilah letak ironi terdalam: program yang dirancang untuk memberdayakan petani, tanpa disadari, justru mengikis kapasitas kemandirian mereka dalam jangka menengah.

Implikasi Kebijakan: Dari Kuantitas Menuju Kualitas Implementasi

Sintesis dari temuan lapangan dan penelitian terdahulu mengarah pada satu kesimpulan sentral: efektivitas belanja pertanian tidak terletak semata-mata pada besarnya alokasi anggaran, melainkan pada kualitas mekanisme implementasinya. Tiga rekomendasi kritis dapat dirumuskan berdasarkan analisis ini.

Pertama, program harus terdiferensiasi berdasarkan zona agroekologis. Keragaman geografis Deli Serdang dari dataran rendah Beringin, kawasan peri-urban Lubuk Pakam, hingga wilayah berpotensi organik di Galang menuntut desain program yang spesifik lokasi, bukan seragam. Kedua, mekanisme distribusi perlu didesentralisasi dan diawasi secara lebih ketat untuk memutus peran *gatekeeper* informal yang menciptakan ketimpangan akses. Ketiga, program perlu digeser dari orientasi pemberian bantuan langsung menuju pemberdayaan kapasitas, agar petani tidak terjebak dalam siklus ketergantungan melainkan mampu beradaptasi dan berinovasi secara mandiri, sebagaimana dicontohkan dalam model pengembangan beras organik oleh Pujiasmanto et al. (2019).

Tabel 5. Ringkasan Temuan Utama Penelitian

Dimensi Temuan	Fakta dari Lapangan	Keterkaitan Penelitian Terdahulu
Persepsi petani terhadap program	Positif untuk subsidi pupuk; negatif untuk ketepatan sasaran dan kualitas bantuan	Prasada et al. (2024): korelasi positif dukungan pemerintah-kesejahteraan
Ketimpangan akses	Petani non-anggota kelompok tani dan wilayah peri-urban tidak terfasilitasi	Pagliacci & Zavalloni (2024): determinan non-ekonomi dalam distribusi dana
Pengaruh geografi	Program lebih efektif di dataran rendah beririgasi; kurang relevan di zona peri-urban dan potensi organik	Pujiasmanto et al. (2019): potensi organik butuh program spesifik

Dinamika sosial	Distribusi melalui poktan menciptakan gesekan sosial dan peran gatekeeper informal	Hapsari et al. (2021): variasi besar dalam kesejahteraan antarpetani
Siklus ketergantungan	Jadwal tanam mengikuti pencairan bantuan, bukan kalender musim optimal	Antara & Effendy (2018): optimasi sumber daya petani terhambat distorsi program
Potensi model sinergi	Integrasi Dana Desa dan program Dinas Pertanian di Galang terbukti lebih efektif	Badrudin et al. (2021): Dana Desa sebagai instrumen pembangunan inklusif

Sumber: Analisis data primer dan sekunder penelitian (2025)

KESIMPULAN

Penelitian kualitatif ini mengkaji dampak pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Deli Serdang melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Berdasarkan seluruh temuan yang telah dianalisis, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang saling berkaitan.

1. Kesimpulan 1: Manfaat Ada, Namun Tidak Merata

Program pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, terutama subsidi pupuk dan benih, terbukti memberikan manfaat nyata dalam meringankan beban biaya produksi petani. Hal ini mengonfirmasi temuan kuantitatif Prasada et al. (2024) yang membuktikan korelasi positif antara dukungan pemerintah dan kesejahteraan petani. Namun, penelitian ini menemukan bahwa manfaat tersebut tidak terdistribusi secara merata. Petani yang tergabung dalam kelompok tani aktif, memiliki lahan yang cukup, dan berlokasi di wilayah dengan infrastruktur memadai seperti Kecamatan Beringin merasakan dampak yang signifikan. Sebaliknya, petani marginal yang tidak masuk jaringan kelembagaan — terutama petani sayur di kawasan peri-urban Lubuk Pakam — hampir tidak merasakan manfaat program sama sekali. Ketimpangan akses ini mengonfirmasi argumen Pagliacci dan Zavalloni (2024) bahwa determinan non-ekonomi, termasuk kedekatan sosial dan posisi dalam jaringan kelompok tani, turut menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari dana publik.

2. Kesimpulan 2: Mekanisme Implementasi adalah Titik Kritis

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan sangat bergantung pada kualitas mekanisme implementasinya. Tiga distorsi implementasi ditemukan secara konsisten di lapangan: pertama, ketidaktepatan sasaran akibat peran kelompok tani sebagai *gatekeeper* informal yang tidak selalu bersifat adil dan transparan; kedua, ketidaksesuaian antara jenis dan kualitas bantuan dengan kebutuhan riil petani di lapangan; dan ketiga, kerumitan birokrasi yang menjadi hambatan bagi petani dengan literasi administrasi terbatas. Ketiga distorsi ini secara kumulatif menciptakan kesenjangan yang lebar antara niat kebijakan dan realitas di akar rumput, sejalan dengan peringatan Antara dan Effendy (2018) bahwa optimasi alokasi sumber daya petani hanya bisa terwujud bila mekanisme program benar-benar mendukung pengambilan keputusan yang rasional di tingkat usaha tani.

3. Kesimpulan 3: Program Mendorong Ketergantungan, Bukan Kemandirian

Temuan yang paling kritis dan paradoksal dari penelitian ini adalah bahwa program bantuan yang dirancang untuk memberdayakan petani justru secara tidak sengaja menciptakan siklus ketergantungan. Pola di mana petani menyesuaikan jadwal tanam dengan jadwal pencairan bantuan — bukan dengan kalender musim yang optimal — merupakan distorsi perilaku yang menurunkan produktivitas secara sistemis. Kondisi ini bertentangan langsung dengan visi pertumbuhan

ekonomi inklusif yang diusung Purwanegara et al. (2018), yang mensyaratkan partisipasi aktif dan inovatif dari seluruh pelaku pertanian. Selama orientasi program masih bersifat *charity-based* daripada *capacity-based*, maka pengeluaran pemerintah yang besar sekalipun tidak akan mampu mendorong pertumbuhan yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tiga kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan saran yang ditujukan kepada dua pihak: pengambil kebijakan dan komunitas peneliti.

4. Saran untuk Pengambil Kebijakan

Pertama, diferensiasi program berbasis zona agroekologis. Pemerintah daerah perlu merancang program yang tidak seragam untuk seluruh wilayah Deli Serdang. Program di Kecamatan Beringin yang berorientasi padi sawah tidak relevan untuk petani sayur di Lubuk Pakam, dan tidak menangkap potensi organik di Galang. Penganggaran yang sensitif terhadap kondisi geografis dan komoditas lokal akan meningkatkan relevansi dan efektivitas program secara signifikan, selaras dengan temuan Pujiasmanto et al. (2019) tentang pentingnya pengembangan berbasis potensi lokal.

Kedua, reformasi mekanisme distribusi melalui poktan. Untuk memutus rantai *gatekeeping* informal, pemerintah perlu mengintroduksi mekanisme kontrol independen dalam distribusi bantuan, misalnya melalui pendataan penerima manfaat berbasis data terpadu, sistem pengaduan yang mudah diakses, dan audit partisipatif berbasis komunitas. Transparansi dan akuntabilitas distribusi adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan inklusif.

Ketiga, pergeseran paradigma dari bantuan langsung menuju pemberdayaan. Proporsi anggaran yang selama ini didominasi oleh bantuan input fisik perlu diimbangi dengan investasi pada pelatihan keterampilan usaha tani, akses informasi pasar, dan pendampingan inovasi produk. Model pengembangan beras organik yang dicontohkan oleh Pujiasmanto et al. (2019) dan model inklusivitas kolaboratif Purwanegara et al. (2018) dapat menjadi rujukan konkret untuk merancang program yang lebih berorientasi pada kemandirian jangka panjang.

Keempat, penguatan sinergi antara program Dinas Pertanian dan Dana Desa. Temuan di Kecamatan Galang menunjukkan bahwa sinergi keduanya menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi petani. Koordinasi lintas instansi yang lebih terstruktur dan sistematis antara Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pemerintah desa dapat menjadi model tata kelola yang lebih efektif dan inklusif, sebagaimana dibuktikan oleh Badrudin et al. (2021).

5. Saran untuk Penelitian Lanjutan

Pertama, penelitian kuantitatif lanjutan sangat direkomendasikan untuk mengukur secara statistik dampak pengeluaran pemerintah terhadap indikator ketimpangan pendapatan di tingkat desa, seperti Indeks Gini mikro dan Nilai Tukar Petani (NTP), guna memvalidasi dan mengkuantifikasi temuan kualitatif penelitian ini.

Kedua, studi komparatif antara Kabupaten Deli Serdang dengan kabupaten lain di Sumatera Utara yang memiliki desain program berbeda akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang faktor-faktor pembeda efektivitas program belanja pertanian.

Ketiga, penelitian tentang analisis rantai nilai (*value chain analysis*) khususnya untuk komoditas potensial seperti beras organik dan hortikultura di Kecamatan Galang dapat mengungkap lebih jauh bagaimana pengeluaran pemerintah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan posisi tawar petani di pasar, sehingga manfaatnya lebih berkelanjutan dan tidak semata bergantung pada siklus bantuan.

DAFTAR REFERENSI

- Antara, M., & Effendy. (2018). Allocation optimization of farmers' resources to achieve maximum income in Parigi Moutong Regency. *Asian Journal of Scientific Research*, 11(2), 101–109. <https://doi.org/10.3923/ajsr.2018.101.109>
- Badrudin, R., Tkela, M. E., & Siregar, B. (2021). The effect of village funds on inclusive village development in Indonesia. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(5), 1–13. <https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4419>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. (2024). *Kabupaten Deli Serdang dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Deli Serdang.
- Bremer, J., Muthalib, A. A., Suriadi, L. O., & Balaka, M. Y. (2024). Testing the effects of economic growth, and the role of the agriculture, forestry and fisheries sectors, and other influential factors in forming community welfare. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, 12(1), 22–35. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/24.1134>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. (2025). *Laporan implikasi pemilihan Kabupaten Deli Serdang sebagai lokasi penelitian*. Laporan internal tidak dipublikasikan.
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government spending, growth, and poverty in rural India. *American Journal of Agricultural Economics*, 82(4), 1038–1051. <https://doi.org/10.1111/0002-9092.00101>
- Hapsari, H., Wulandari, E., Suminartika, E., & Karyani, T. (2021). The family welfare of horticulture farmers: Case in Pegalangan District, Bandung Regency, West Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 765(1), 012015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/765/1/012015>
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pagliacci, F., & Zavalloni, M. (2024). The political economy determinants of agri-environmental funds in the European Rural Development Programmes. *Bio-based and Applied Economics*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.36253/bae-14423>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prasada, I. Y., Anisya, A. P. M., & Nugroho, A. D. (2024). Impact of agricultural infrastructure and government support on farmers' welfare in Indonesia. *Songklanakarinn Journal of Science and Technology*, 46(1), 1–12. <https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2024.8>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
- Pujiasmanto, B., Suryandari, R. T., & Aliyah, I. (2019). Development of organic rice potentials as drivers of rural economy towards sustainable national agricultural development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 250(1), 012002. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/250/1/012002>
- Purwanegara, M. S., Aprianingsih, A., Hannel, J. J., & Ismail, W. K. W. (2018). Bringing collaborative inclusiveness to Indonesian agribusiness in West Java through online platform. *International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology*, 14(2), 127–142. <https://doi.org/10.1504/IJARGE.2018.091876>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

- Ranieri, R., & Ramos, R. A. (2013). Inclusive growth: Building up a concept. *International Policy Centre for Inclusive Growth Working Paper, 104*. UNDP International Policy Centre for Inclusive Growth.
- Scott, J. C. (1976). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- World Bank. (2008). *World development report 2008: Agriculture for development*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6807-7>
- World Bank. (2012). *Inclusive green growth: The pathway to sustainable development*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9552-3>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.